

ABSTRAK

Yunita Ayu Permatasari K8410063. **RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR COKRO TULUNG KABUPATEN KLATEN**. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konflik yang terjadi di Sumber Mata Air Cokro Tulung Kabupaten Klaten; (2) untuk mengetahui resolusi konflik pengelolaan air di Sumber Mata Air Cokro Tulung Kabupaten Klaten

Konflik ini terjadi antara warga dengan warga, warga dengan petani, petani dengan petani, warga dengan PDAM Solo dan PDAM Klaten, petani dengan PDAM Solo dan PDAM Klaten, warga dengan Pabrik Air Minum, petani dengan Pabrik Air Minum, dan Pemkab Klaten dengan PDAM Solo. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan study kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan dari teori Fisher tentang tingkatan konflik dan sumber konflik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa air di sumber mata air Cokro menimbulkan konflik yang menyangkut banyak pihak. Telah dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi konflik diantaranya musyawarah, kolaborasi, negosiasi dan mediasi. Dampak konflik dan resolusi konflik mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di masyarakat desa Cokro

Kata Kunci : resolusi Konflik, mata air, Cokro

ABSTRACT

Yunita Ayu Permatasari K8410063. **THE RESOLUTION OF COKRO TULUNG WATER SOURCE MANAGEMENT CONFLICT IN KLATEN REGENCY** .Thesis, Surakarta: Teacher and Training Education Faculty Sebelas Maret University. Surakarta. February 2017.

This study aims to (1) find out the conflicts occurring in Sumber Mata Air Cokro Tulung Klaten Regency; (2) to know the conflict resolution of water management at Sumber Mata Air Cokro Tulung Klaten Regency.

This conflict occurred between citizens with citizens, residents with farmers, farmers with farmers, residents with PDAM Solo and PDAM Klaten, farmers with PDAM Solo and PDAM Klaten, residents with Drinking Water Factory, farmers with Drinking Water Factory, and Pemkab Klaten with PDAM Solo . This research uses descriptive qualitative method with case study approach. Research data obtained through interview and observation. This study uses Fisher's theory of conflict levels and sources of conflict.

The results of this study indicate that water in Cokro springs causes conflict that concerns many parties. Attempts have been made to resolve conflicts such as deliberation, collaboration, negotiation and mediation. The impact of conflict and conflict resolution affect the social, economic and environmental conditions in Cokro village communities.

Keywords: Conflict resolution, springs, Cokro

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat terhadap air ini mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan fungsi dan nilai sosialnya. Air yang semula tidak banyak dilihat sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi, tiba-tiba berubah menjadi barang yang nilai ekonominya sangat tinggi sehingga secara sosial, ekonomi, dan bahkan politik menjadi komoditas yang diperebutkan. Melihat kondisi seperti ini air menjadi sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan baik antar sektor, antar wilayah maupun berbagai pihak yang berkaitan dengan sumber daya air.

Kebijakan Desentralisasi atas pelimpahan wewenang terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya secara tidak sadar juga membuat sumber air tereksplorasi secara berlebihan. Pemanfaatan sumber air yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat sekarang malah seakan akan menjadi ladang bisnis dengan dahlil demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Di Indonesia banyak terjadi konflik terkait tentang pengelolaan sumber air. Sebagian besar konflik tersebut timbul dikarenakan adanya pertentangan antara masyarakat setempat dengan perusahaan air minum yang ingin mengelola demi kepentingan sendiri. Perizinan pemerintah terhadap pengelolaan sumber air kepada perusahaan air minum pun menimbulkan benturan kepentingan yang berdampak pada terjadinya konflik. Hal ini menimbulkan kekecewaan masyarakat setempat karena mereka yang memiliki wilayah sumber air merasa dicurangi oleh pihak lain

dalam memanfaatkan sumber air yang sama.

Konflik pemanfaatan air ini juga terjadi di sumber mata air Cokro Tulung Klaten. Permasalahan konflik muncul ketika masyarakat merasakan debit air yang di sumber mata air Cokro dulunya melimpah sekarang menurun ketika di daerah sekeliling sumber mata air dibangun PDAM dan adanya Pabrik Aqua. Berdirinya PDAM dan Pabrik Aqua yang menyedot air dengan kekuatan pompa berdaya besar mengakibatkan pasokan air untuk hektaran sawah di sekitar mata air menjadi berkurang. Padahal sebelum adanya pembangunan PDAM dan Pabrik Aqua jangkauan aliran mata air bisa sampai ke daerah Pedan dan Cawas. Terkait dengan perselisihan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kota Solo yang tidak mau menerima keputusan yang dianggap sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menaikkan tarif retribusi setiap tahunnya. Hal tersebut membebani APBD Kota Solo sehingga membuat Pemkot Solo tidak membayar tagihan retribusi air sejak tahun 2013. Dilain sisi, Pemerintah Kabupaten Klaten didalam meningkatkan retribusi pendistribusian air dari Cokro Tulung ke PDAM Solo bukan semata-mata hanya memandang dari aspek jual beli air saja, melainkan Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan pertimbangan bahwa air permukaan yang sebagian diambil ke Solo menyangkut banyak kepentingan, termasuk para petani pemakai air. Oleh karena itu, mau tidak mau tiap tahun Pemerintah Kabupaten Klaten meningkatkan tarif retribusi pendistribusian

dikarenakan Solo juga banyak menggunakan air tersebut, sehingga peningkatan retribusi tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten yang berada disekitar Cokro Tulung maupun lainnya. Hal ini menarik peneliti ingin mengetahui lebih jauh konflik dan resolusi konflik tentang pengelolaan sumber mata air Cokro Tulung Kabupaten Klaten.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Konflik

Konflik menurut pandangan Fisher (2000), konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan ataupun kepentingan, dalam mengontrol maupun mengendalikan pihak lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan dan ketidaksesuaian tujuan, nilai yang tidak sejalan antara pihak satu dengan pihak lainnya terkait mempersepsikan tujuan atau nilai nilai mereka secara berbeda.

Sumber konflik menurut Fisher (2000,1-2) dikelompokkan menjadi empat yaitu alasan ekonomi, alasan nilai, alasan kekuasaan (power) dan komunikasi tidak efektif. Konflik berdasarkan faktor ekonomi ini mencakup motivasi untuk bersaing dalam merebutkan sumber daya yang langka. Pihak yang bersengketa ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan perilaku serta emosi masing masing pihak ingin menguasai sumber daya yang ada. Hal ini seperti konflik yang terjadi di sumber mata air Cokro Klaten. Konflik muncul ketika PDAM Solo tidak mau membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten Klaten. Dimana PDAM Solo ingin tetap disuplai air dan ingin menguasai sumber air Cokro Tulung untuk kesejahteraan masyarakatnya. Padahal sumber mata air di Cokro Tulung juga dimanfaatkan menyangkut banyak kepentingan, yaitu baik para petani maupun masyarakat daerah Cokro dan sekitarnya.

Konflik muncul juga terjadi karena perbedaan nilai. Perbedaan nilai ini terkait adanya ketidaksesuaian cara-cara hidup, ideologi, preferensi (selera), prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang mereka yakini. Seperti permasalahan antara PDAM Solo dengan Pemerintah Kota Klaten, bahwa PDAM Solo menganggap pengambilan air di sumber mata air Cokro merupakan air permukaan yang bebas untuk dimanfaatkan untuk semua masyarakat tanpa harus terikat dengan syarat tertentu

Selain itu konflik juga bisa terjadi karena faktor kekuasaan. Konflik ini terjadi ketika masing masing pihak berkeinginan untuk mempertahankan atau memaksimalkan sejumlah pengaruh yang dipaksakan oleh kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan dalam lingkungan sosial. Hal ini PDAM Solo berangapan mereka tidak harus mematuhi dan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah Kabupaten Klaten karena dulunya pada zaman kerajaan sumber mata air Cokro wilayah yang masuk dalam kekuasaan Kasunanan Surakarta. Sedangkan Klaten menganggap masa sekarang merupakan sistem pemerintahan modern, setiap wilayah yang memiliki potensi sumber daya

dikelola dan dikontrol oleh pemerintah daerah sendiri.

Tingkatan Konflik menurut Fisher (2000,3-4) dibagi menjadi dua kelompok yaitu konflik pribadi dan konflik sosial. Konflik pribadi biasanya cenderung lebih tepat di kaji secara dalam melalui kajian psikologi. Sebaliknya konflik sosial memiliki dimensi luas karena jenis konflik ini mencakup konflik antar pribadi, konflik peran, konflik antar kelompok, konflik berbagai pihak.

Konflik menurut pemikiran Collin menjelaskan bahwa konflik merupakan interaksi antar individu yang bersifat intensif, namun pada kenyataannya bersifat kompleks dan abstrak sehingga memerlukan suatu analisis yang berbeda. Kepentingan individu diarahkan agar sesuai dan sejalan dengan kepentingan organisasi atau kelompok melalui tekanan dan pemaksaan agar terciptannya keteraturan sosial.

Sedangkan teori konflik berdasarkan pemikiran Dahrendorf, konflik mengarah pada kekangan yang dilakukan dengan paksaan sehingga beberapa posisi didalam masyarakat adalah kekuasaan yang diletakkan dan otoritas atas pihak lain. Dahrendorf menyatakan otoritas tidak terletak dalam individu, melainkan pada posisi. Dalam analisis konflik mengidentifikasi berbagai peran otoritas masyarakat. Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Dahrendorf menganggap konflik adalah satu bagian dari realitas sosial yang mana konflik tersebut juga bisa menyebabkan perubahan dan

perkembangan. Teori konflik dipahami melalui pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja akan tunduk pada perubahan sehingga masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu.

2.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah kemampuan untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah atau konflik antar individu secara sukarela. Solusi konflik dapat dihasilkan melalui kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik yang sifatnya demokratis dan konstruktif sehingga semua pihak merasa tidak dirugikan

Menurut Rahmadi (2011:12-20) resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa macam cara seperti berikut :

- a. Negoisasi adalah penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik tanpa adanya pihak lain. Tujuan ini diharapkan menghasilkan keputusan yang diterima dan dipatuhi secara sukarela.
- b. Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan meminta bantuan pihak yang netral namun tidak memiliki wewenang dalam memutuskan penyelesaian konflik.
- c. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dengan meminta bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan memutuskan. Hasil keputusan dalam arbitrasi dapat

bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Pemilihan arbitrator di pilih berdasarkan pilihan oleh pihak yang berkonflik.

- d. Litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian konflik melalui pengadilan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap pihak lain yang menyebabkan timbulnya kerugian. Keputusan dalam litigasi bersifat mengikat simana pihak yang berkonflik yang akan memimpin sidang dan memutuskan perkara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dikripsi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan mengenai konflik dan resolusi konflik pengelolaan sumber mata air Cokro Tulung Kabupaten Klaten. Subjek penelitian ini adalah warga masyarakat desa Cokro, Sekda Klaten dan pegawai PDAM solo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data meliputi : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian: persiapan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan.

4. PEMBAHASAN

Konflik ini terjadi bukan hanya mencakup konflik antar pribadi melainkan juga konflik antar kelompok. Hal ini sesuai dengan jenis-jenis tingkatan konflik sosial

yang dipaparkan menurut pandangan Fisher. Konflik pribadi ini terjadi antara warga masyarakat desa Cokro yang satu dengan yang lain, antara petani dengan petani, dan warga dengan petani. Sedangkan konflik antar kelompok terjadi antara warga masyarakat Cokro dengan para petani, warga masyarakat dan petani dengan PDAM Solo. Permasalahan konflik yang menyangkut pendistribusian air dari Umbul Cokro Tulung yang dilakukan oleh Pemkab Klaten ke Kota Solo masih berkaitan dengan sistem kerjasama yang terjalin sejak pada zaman penjajahan Belanda. Hal ini sesuai pemikiran Fisher mengatakan salah satu sumber terjadinya konflik disebabkan karena faktor kekuasaan. Konflik ini terjadi ketika masing-masing pihak berkeinginan untuk mempertahankan atau memaksimalkan sejumlah pengaruh yang dipaksakan oleh kedua belah pihak ke dalam suatu hubungan di lingkungan sosial. Hubungan pendistribusian air dari umbul Cokro ke Kota Solo tersebut merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama, hal itu menjadi suatu adat kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang-ulang karena Klaten dahulu merupakan wilayah yang masuk dalam kekuasaan Kasultanan Surakarta sehingga sampai saat ini sistem kebiasaan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam hubungan kerjasama dalam pemanfaatan air selama ini. Namun Pemkab Klaten menganggap masa sekarang merupakan sistem pemerintahan modern, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengontrol dan mengelola sumber daya yang ada

diwilayahnya. Sehingga pemerintah daerah (Klaten) memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menentukan keputusan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat. Perubahan ini terjadi seiring dengan perubahan waktu dan kondisi serta sistem pemerintahan yang berlaku saat ini.

Fisher juga membahas mengenai sumber konflik berdasarkan alasan ekonomi. Nilai ekonomi menjadi sesuatu hal yang sensitif ketika pihak yang menjalin hubungan tidak dapat menjaga kepercayaan pihak lain. Dan pihak lain dirasa memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lawan. Menurut keterangan dari informan N, pemanfaatan air dari sumber mata air Cokro selama ini di hitung dengan rumus : $\text{Volume air} \times 15\% \times \text{tarif dasar air}$. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Klaten dan PDAM Solo namun sayangnya belum ada Mou atau perjanjian kerjasama yang mengatur hal tersebut. Sehingga apabila tarif dasar air naik, maka biayanya otomatis akan naik juga sejalan dengan kenaikan tarif dasar air. Oleh karena itu, seperti yang telah diungkapkan informan S bahwa kenaikan retribusi tersebut Pemerintah Kota Surakarta merasa APBD terbebani dengan adanya kenaikan tarif setiap tahunnya yang tidak bisa dibilang sedikit.

Kerjasama yang dilakukan Pemkab Klaten dengan Pemkot Solo ini, kurang adanya sinergi atau upaya mewujudkan harmonisasi dalam hubungan kerjasama antar daerah.

Kurang adanya komunikasi dan keterbukaan antara kedua daerah sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan sumber konflik menurut pandangan Fisher mengenai komunikasi yang tidak efektif antara kedua belah pihak dalam transparansi kenaikan retribusi yang diminta Pemerintah Kabupaten Klaten kepada Pemkot Solo

Mediasi telah dilakukan dua kali di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di lantai IV Kantor Gubernur Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu 12 Desember 2012 dan mediasi yang digelar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 yang berlangsung di Klaten. Mediasi ini termasuk kedalam katagori Problem solving Approach, dimana Problem solving Approach termasuk salah satu dari empat tahapan Resolusi Konflik. Problem solving Approach ini diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak pihak yang bersengketa.

Selama ini, mediasi yang telah dilakukan tidak menemukan titik terang dari permasalahan tersebut karena Pemkab Klaten merasa Pemkot Solo tetap harus membayar tunggakan yang belum dibayarkan hingga sampai saat ini belum ada mediasi lanjutan antara Klaten dengan Solo terkait konflik yang terjadi dalam pemanfaatan air dari Umbul Cokro Tulung.

Hubungan antara pemkab Klaten dengan Pemkot Solo menjadi renggang terkait penunggakan pembayaran yang selama ini seharusnya dibayarkan kepada Pemkab Klaten. PDAM Solo merasa diuntungkan, karena hingga sampai

saat ini pemutusan pasokan tidak terjadi dilakukan karena larangan dari Pemerintah Pusat. Akibat tidak dibayarkannya sumbangan pihak ketiga sedikit banyak juga menghambat perbaikan fasilitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Sumber Mata Air Cokro.

Konflik yang terjadi antara Pemkab Klaten dengan PDAM Solo meskipun belum terselesaikan, memang seharusnya pihak Klaten tetap harus mengalirkan air dari umbul Cokro Tulung ke Kota Solo mengingat adanya hak atas air dari masyarakat sekitar Kabupaten Klaten termasuk Kota Solo.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Mata Air Cokro Tulung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan. Kelangkaan sumber air mendorong timbulnya konflik seperti yang terjadi di sumber mata air Cokro yang menyangkut kepentingan banyak pihak.
2. Konflik pemanfaatan sumber mata air Cokro Konflik ini terjadi bukan hanya mencakup konflik antar pribadi melainkan juga konflik antar kelompok. Hal ini sesuai dengan jenis-jenis tingkatan konflik sosial menurut pandangan Fisher. Konflik pribadi ini terjadi antara warga masyarakat desa Cokro yang satu dengan yang lain, antara petani dengan petani, dan warga dengan petani. Sedangkan konflik antar kelompok terjadi antara warga masyarakat Cokro dengan para

petani, warga masyarakat dan petani dengan PDAM Solo.

3. Dalam teori konflik menurut Fisher ada empat sumber konflik yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sumber mata air Cokro, diantaranya alasan ekonomi, nilai, kekuasaan dan komunikasi tidak efektif. Alasan ekonomi terkait pemberhentian pembayaran retribusi yang dilakukan oleh PDAM Solo kepada Klaten namun Solo tetap menginginkan tetap dialiri air dari sumber mata air Cokro. Alasan karena faktor nilai yaitu PDAM Solo merupakan air permukaan yang bebas dimanfaatkan oleh semua masyarakat tanpa syarat tertentu, sedangkan pihak Klaten menganggap sumber mata air Cokro merupakan air tanah sehingga Solo wajib membayar dikarenakan sumber mata air Cokro merupakan wilayah Klaten. Alasan kekuasaan mengenai perbedaan pendapat antara Solo yang berpedoman pada sistem pemerintahan dahulu dengan Klaten yang sudah memakai sistem pemerintahan modern dalam mengatasi konflik yang ada. Alasan konflik karena komunikasi tidak efektif terjadi pada tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak yaitu Pemkab Klaten dengan Pemkot Solo dalam menaikkan tarif dasar air.
4. Resolusi konflik telah dilakukan dengan jalan musyawarah, kolaborasi, negosiasi dan mediasi. Namun mediasi untuk menangani konflik yang menyangkut sistem kerjasama

dalam pendistribusian air dari Cokro ke kota Solo belum membuahkan hasil yang berarti, dengan kata lain mediasi tersebut masih stagnan atau berjalan ditempat.

6. SARAN

Setelah mengadakan penelitian dan pengkajian tentang resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Mata Air Cokro Tulung Kabupaten Klaten penulis dapat memberikan saran-saran untuk menambah wawasan mengenai hal sebagai berikut :

1. Perlunya dibentuk sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam menangani pembagian jadwal.
2. Pemerintah Kabupaten Klaten sebaiknya yang akan datang apabila akan melakukan kerjasama dengan pihak manapun terkait dengan pemanfaatan sumber daya air perlu membuat MoU (Memorandum of Understanding) terlebih dahulu secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi dengan Kota Solo.
3. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Klaten bisa bersifat tegas mengenai permasalahan

pengelolaan air yang terjadi di sumber mata air Cokro.

4. Sebaiknya pihak Pemkot Solo memiliki etika baik untuk menyelesaikan tunggakan yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.
5. Pemerintah Provinsi seharusnya lebih bersikap netral terkait permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Kota Solo tanpa memihak salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

- George Ritzer,(2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- George Ritzer, Douglas J.Goodman.(2008).*Teori Sosiologi Cetakan Kesepuluh*. Yogyakarta: Wacana
- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Probohudono Nur Agung, Rohmad Zaini.(2015). *Sosiologi Pembangunan: Dinamika Resolusi Konflik Pengelolaan Air di Wilayah Pariwisata (Cetakan ke-1)*. Surakarta: UNS Press